



REPUBLIK INDONESIA

PIDATO MENTERI KEUANGAN

**POKOK-POKOK
KETERANGAN PEMERINTAH**

MENGENAI

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**



REPUBLIK INDONESIA

**POKOK-POKOK KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sehat dan Salam Sejahtera,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan*

Yang kami hormati,
Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kemudahan kepada kita untuk hadir pada Sidang Paripurna DPR RI hari ini dengan agenda **“Penyampaian Pokok–Pokok Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang–Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022”**, atau selanjutnya dapat kita sebut RUU P2 APBN.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2022, yaitu berupa **Opini Wajar Tanpa Pengecualian**

(Opini WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022, dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada kesempatan ini, **kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang telah bersama-sama melaksanakan APBN TA 2022.** Terima kasih juga kami sampaikan kepada DPR dan BPK yang telah banyak memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara baik di periode sebelumnya, saat ini maupun di masa yang akan datang.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sebelum menjelaskan Pokok–Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2 APBN TA 2022, izinkan kami menyampaikan kembali situasi pelaksanaan APBN sepanjang tahun 2022. **Tahun 2022 adalah tahun ketiga sejak terjadinya Pandemi Covid-19.** Seluruh perekonomian dunia masih menghadapi proses pemulihan yang tidak mudah dan kompleks. Kondisi ini bahkan ditambah dengan munculnya ketegangan dan persaingan geopolitik yang meruncing serta perang di Ukraina, makin menambah disrupsi perekonomian global yang luar biasa. Dunia terancam resesi dan terhantam inflasi yang melonjak sangat tinggi, terburuk dalam 40 tahun terakhir.

Kondisi ini mendorong diterapkannya pengetatan kebijakan moneter di negara maju yang menyebabkan lonjakan suku bunga secara agresif dan cepat di berbagai negara, menimbulkan disrupsi arus modal keluar dari berbagai negara berkembang dan *emerging market*. Guncangan susulan pasca pandemi dan ketidakpastian geopolitik memukul pemulihan ekonomi global.

Dalam guncangan dan kompleksitas kondisi global pasca pandemi, kita bersyukur Indonesia mampu menjaga pemulihan ekonomi secara baik. APBN TA 2022 seperti yang terjadi sejak 2020 bekerja luar biasa keras menjaga perekonomian dan kesehatan serta keselamatan masyarakat.

Seperti kita ingat bersama pada tahun 2020, untuk mengatasi ancaman hebat dan kegentingan yang memaksa akibat pandemi Covid-19, **Pemerintah mengambil kebijakan luar biasa (*extraordinary*)** melalui penerbitan Perppu

Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, dimana peranan Keuangan Negara dan APBN sangat sentral dan vital, dengan defisit diperbolehkan menembus diatas batas 3 persen terhadap PDB yang telah dianut sejak 2003. Defisit di atas 3 persen hanya berlaku selama 3 tahun (2020-2022).

Semua langkah penanganan pandemi Covid-19 dan stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dilakukan menggunakan instrumen APBN. Pada tahun pertama Pandemi Covid-19, kondisi ekonomi mandek dan merosot yang menyebabkan penerimaan negara mengalami kemerosotan tajam. APBN bekerja luar biasa dengan konsekuensi terjadi pelebaran defisit APBN menjadi 6,14 persen terhadap PDB, dimana realisasi anggaran untuk program PC-PEN mencapai Rp575,9 triliun.

Pada tahun 2021, di tengah amukan hebat pandemi Covid-19 varian Delta yang mematikan, APBN bekerja sangat keras untuk terus mendorong pemulihan ekonomi dan melindungi keselamatan dan kesehatan rakyat. Namun APBN TA 2021 juga tetap dijaga kesehatannya dengan memulai proses konsolidasi, sehingga defisit diturunkan menjadi 4,57 persen terhadap PDB. Dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi tetap sangat sentral dan kuat dimana program PC-PEN bahkan meningkat signifikan mencapai sebesar Rp655,1 triliun.

APBN TA 2022 berakhir dengan postur yang lebih sehat dengan defisit telah mencapai level di bawah 3 persen terhadap PDB, yaitu 2,35 persen terhadap PDB. Ini menunjukkan bahwa **konsolidasi fiskal terlaksana satu tahun lebih cepat** dari yang dimandatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, dan rasio utang sudah mulai menurun kembali menjadi 39,7 persen terhadap PDB.

Alhamdulillah pandemi telah makin dapat dikendalikan, ini salah satunya karena program vaksinasi telah meluas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah lanjutan untuk pemulihan ekonomi dan normalisasi aktivitas masyarakat, ekonomi Indonesia tumbuh stabil tinggi.

Pemerintah dengan dukungan DPR terus mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi dengan melaksanakan agenda reformasi struktural. Berbagai legislasi penting seperti: Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Undang-Undang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah dibahas dan disetujui. Ini menjadi landasan penting bagi berlanjutnya pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia ke depan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemulihan ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan kuat dan cepat. **Ekonomi Indonesia tahun 2022 dapat tumbuh 5,31 persen** atau di atas target APBN yaitu 5,2 persen. Secara level, **PDB riil tahun 2022 sudah berada 7,0 persen di atas level PDB 2019**. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu terus melakukan ekspansi dengan *robust* dan konsisten, terutama apabila kita mempertimbangkan dinamika perekonomian global yang sangat *volatile* pada periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia tahun 2022 ini juga terjadi secara lebih merata, dimana **seluruh sektor produksi dan wilayah di Indonesia mampu bangkit dan tumbuh positif**.

Pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 juga terjadi secara inklusif. Kesejahteraan masyarakat yang sempat terimbas oleh pandemi Covid-19 terus pulih dan membaik. Perbaikan ini tercermin dari peningkatan kualitas berbagai indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2022 dibandingkan 2021, sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,49 persen menjadi 5,86 persen;
2. Tingkat ketimpangan (rasio gini) tetap 0,381;
3. Angka kemiskinan menurun dari 9,71 persen menjadi 9,57 persen; dan
4. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 72,29 menjadi 72,91.

Efektivitas kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi serta berbagai kebijakan transformasi struktural, berhasil membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan relatif tinggi, sejak Q1-2021 berturut-turut terus tumbuh di atas 5 persen. Dengan proses pemulihan ekonomi yang kuat dan stabil, Bank Dunia per 1 Juli 2023 ini kembali memasukkan Indonesia ke dalam grup *Upper Middle-Income Countries* (UMIC). GNI per capita Indonesia naik 9,8 persen di tahun 2022 menjadi USD4,580. Ini proses pemulihan yang cepat, setelah turun ke grup *Lower Middle-Income Countries* (LMIC) di tahun 2020 karena pandemi.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022. **Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).** RUU P2 APBN TA 2022 diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **LKPP Tahun 2022 terdiri atas tujuh komponen laporan**, yaitu: (1) Laporan Realisasi APBN, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2022, tercermin dalam LKPP Tahun 2022. Ringkasan dari masing-masing laporan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dalam Laporan Realisasi APBN dijelaskan bahwa **Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.635,8 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp595,6 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5,7 triliun.** Realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN TA 2022, yaitu **116,31 persen atau tumbuh 31,05 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.** Capaian pendapatan negara yang tinggi tersebut menunjukkan suatu **recovery dan rebound yang sangat kuat**, baik yang berasal dari Penerimaan Perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kinerja pendapatan negara tersebut selaras dengan peningkatan *tax ratio* dari 9,12 persen pada tahun 2021 menjadi 10,39 persen pada tahun 2022, yang merupakan capaian tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Pada TA 2022 **Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.096,3 triliun** atau 99,67 persen dari pagu APBN TA 2022. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari **Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280,0 triliun** serta **Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp816,2 triliun**. Realisasi Belanja Negara meningkat Rp309,8 triliun atau 11,12 persen dari realisasi tahun 2021. Hal ini sejalan dengan strategi APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi perekonomian dan masyarakat, dari dampak risiko ketidakpastian perekonomian global, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara, terdapat **Defisit Anggaran sebesar Rp460,4 triliun**. Realisasi defisit anggaran Tahun 2022 berada pada level 2,35 persen terhadap PDB. Angka defisit ini lebih rendah dari target APBN sebesar 4,69 persen dan juga lebih kecil dibandingkan defisit tahun 2021 yaitu sebesar 4,57 persen dari PDB.

Realisasi pembiayaan TA 2022 Rp590,9 triliun atau 70,34 persen dari yang direncanakan dalam APBN sebesar Rp840,2 triliun. Pembiayaan tersebut terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri **Rp563,8 triliun** dan Pembiayaan Luar Negeri **Rp27,1 triliun**. Selain untuk menutup defisit, pembiayaan tahun 2022 juga dimanfaatkan untuk investasi Pemerintah pada BUMN dan BLU, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan defisit yang lebih rendah, sebagai akibat membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, terdapat **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp130,5 triliun**.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Dalam **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**, dijelaskan bahwa **SAL awal Tahun 2022 sebesar Rp337,8 triliun**. Setelah memperhitungkan SiLPA dan penyesuaian SAL, maka **SAL akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp478,9 triliun**. SAL tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai *fiscal buffer* dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian pada tahun 2023.

Posisi keuangan Pemerintah ditunjukkan dalam **Neraca** per 31 Desember 2022 terdiri dari **Aset sebesar Rp12.325,5 triliun** yang meningkat dibandingkan

per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.454,6 triliun, **Kewajiban sebesar Rp8.920,6 triliun** meningkat dari posisi 2021 sebesar Rp7.538,3 triliun, **dan Ekuitas sebesar Rp3.404,9 triliun** atau turun dari ekuitas tahun 2021 sebesar Rp3.916,3 triliun.

Penurunan Ekuitas Pemerintah tahun 2022 dikarenakan sifat pengeluaran atau beban operasional Pemerintah yang sebagian besar tidak membentuk aset, antara lain beban pengeluaran untuk penanganan pandemi dan program kesehatan, bantalan sosial, pendidikan, dan dukungan kepada dunia usaha termasuk beban Transfer ke Daerah. Berbagai beban operasional tersebut sangat krusial dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi dan telah memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan terselenggaranya jaminan sosial serta dukungan kepada dunia usaha.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Dalam **Laporan Operasional (LO)** Tahun 2022 disampaikan bahwa **Pendapatan Operasional sebesar Rp2.913,6 triliun dan Beban Operasional sebesar Rp3.150,2 triliun**, yang membentuk Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp236,6 triliun. Di samping itu, terdapat **Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp243,7 triliun**, sehingga membentuk **Defisit Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp480,3 triliun**.

Laporan Arus Kas Tahun 2022 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara selama tahun 2022. **Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp220,4 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp347,2 triliun, dan arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp698,2 triliun**, serta **arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp20,0 triliun**. Arus kas bersih Aktivitas Investasi yang bernilai negatif mencerminkan adanya upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Dalam **Laporan Perubahan Ekuitas** dapat kami sampaikan bahwa **Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp3.916,3 triliun**. Setelah memperhitungkan Defisit Laporan Operasional sebesar Rp480,3 triliun, Penyesuaian yang Langsung

Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar minus Rp31,3 triliun, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,1 triliun, maka **Ekuitas Akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.404,9 triliun.**

Sesuai amanat Perppu 1 Tahun 2020, Realisasi Program PC-PEN TA 2022 juga dilaporkan secara komprehensif dalam LKPP Tahun 2022. Program PC-PEN menjadi kunci penting dalam pemulihan baik kesehatan maupun ekonomi di tahun 2022 ini. **Program PC-PEN TA 2022 dikelompokkan dalam tiga sektor** yaitu: (1) Sektor Penanganan Kesehatan, (2) Sektor Perlindungan Masyarakat, dan (3) Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi. **Realisasi program PC-PEN Tahun 2022 mencapai Rp396,2 triliun dari total alokasi sebesar Rp455,6 triliun.** Dari tiga sektor Program PC-PEN, realisasi terbesar terdapat pada **Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp174,5 triliun**, yang diikuti dengan **Sektor Perlindungan Masyarakat Rp153,4 triliun**, dan **Sektor Penanganan Kesehatan sebesar Rp68,3 triliun.**

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2022, terdapat **16 temuan pemeriksaan yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.** Meskipun demikian, Pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut, sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa mendatang. **Tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah, antara lain:**

1. Berkenaan dengan temuan terkait penerapan **Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan laporan keuangan,** Pemerintah akan menyempurnakan kebijakan pengelolaan dan sistem aplikasi SAKTI untuk mendukung kebutuhan validasi kualitas pengelolaan kas pada satuan kerja, identifikasi transaksi resiprokal dan analisa laporan keuangan, termasuk pengelolaan periode pada aplikasi SAKTI, untuk menjamin kelengkapan dan keakuratan angka yang disajikan pada laporan keuangan.
2. Mengenai temuan terkait **Pengelolaan Fasilitas dan Insentif Perpajakan Tahun 2022,** Pemerintah akan melakukan penelitian dan proses *matching* atas

data insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serta melakukan pengawasan dan penelitian atas pemanfaatan insentif dan fasilitas perpajakan, serta menindaklanjuti hasil penelitian tersebut.

3. Berkaitan dengan temuan **pengelolaan Belanja Kredit Usaha Rakyat (KUR)**, Pemerintah akan melakukan rekonsiliasi tagihan dan menyempurnakan Sistem Informasi Kredit Program. Selain itu, Pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan kebijakan tambahan subsidi KUR pada Tahun 2022.
4. Berkenaan dengan temuan **penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF)**, Pemerintah akan menyelaraskan pengaturan batas saldo kas untuk penyaluran TDF dengan batas saldo kas untuk penarikan TDF oleh daerah. Di samping itu, Pemerintah akan mendorong peningkatan kualitas data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan melakukan evaluasi formula perhitungan yang menjadi dasar penetapan daerah dan besaran Dana Bagi Hasil maupun Dana Alokasi Umum yang disalurkan melalui fasilitas TDF.
5. Mengenai temuan **Cost Overrun pada Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)**, dapat kami sampaikan bahwa Komite KCJB memutuskan bahwa kelebihan dana PMN tahun 2022 tetap menjadi PMN dan digunakan sebagai *buffer* penjaminan. Selain itu, Pemerintah akan berkoordinasi dengan PT KAI (Persero) guna penyelesaian jenis pekerjaan/biaya dalam *cost overrun* yang tidak disepakati oleh pihak Tiongkok. Pemerintah akan meminta PT KAI (Persero) agar menyusun strategi pemenuhan pendanaan *cost overrun* porsi non ekuitas melalui pinjaman dan mitigasi risikonya secara memadai.
6. Atas temuan mengenai **Piutang Perpajakan, Pemerintah** akan melakukan penelitian data piutang perpajakan, meningkatkan kecermatan dalam penginputan data, dan melakukan pengembangan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan dan *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA 4.0) serta mengoptimalkan pengelolaan dan pengurusan piutang perpajakan.
7. Mengenai temuan **Penyajian Aset Konsesi Jasa Dan Properti Investasi** pada LKPP Tahun 2022, Pemerintah akan mengidentifikasi kerja sama

Pemerintah dengan pihak ketiga yang memenuhi kriteria aset konsesi jasa dan menertibkan dokumentasi aset konsesi jasa tersebut. Pemerintah juga akan menyelesaikan permasalahan pengelolaan Aset Kelolaan BLU yang memenuhi karakteristik Properti Investasi yang didukung dengan penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Demikian Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggung-jawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022. RUU ini diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Sekali lagi, kita semua pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah membimbing kita semua melalui masa-masa sulit yang luar biasa. Semoga dengan kerja keras dan kebersamaan yang kita miliki, menjadi modal bagi kita untuk terus memberikan upaya maksimal dalam memulihkan perekonomian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita, meningkatkan kualitas APBN sebagai instrumen kebijakan guna mencapai cita-cita nasional, mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu dan hadirin semua.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith-thariq

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om shanti shanti shanti om,

Namo Buddhaya.

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan**

Ttd

Sri Mulyani Indrawati